



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-05 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun **2021-2026**. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun **2021-2026**.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,



efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Kutai Timur, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Kutai Timur



NORA RAMADANI, SH, MH
NIP 19720330 200502 1 001
Pembina TK. I (IV/b)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	6
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	35
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan



penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fusngsi Serta Tata Kerja Dinas Perndustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang memiliki susunan organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2 Sub Bagian Program dan Keuangan



- c. Bidang Industri
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- f. Bidang Kemetrologian
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur juga dibantu oleh UPT Pasar sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur, yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan memiliki susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah Kabupaten Kutai Timur.



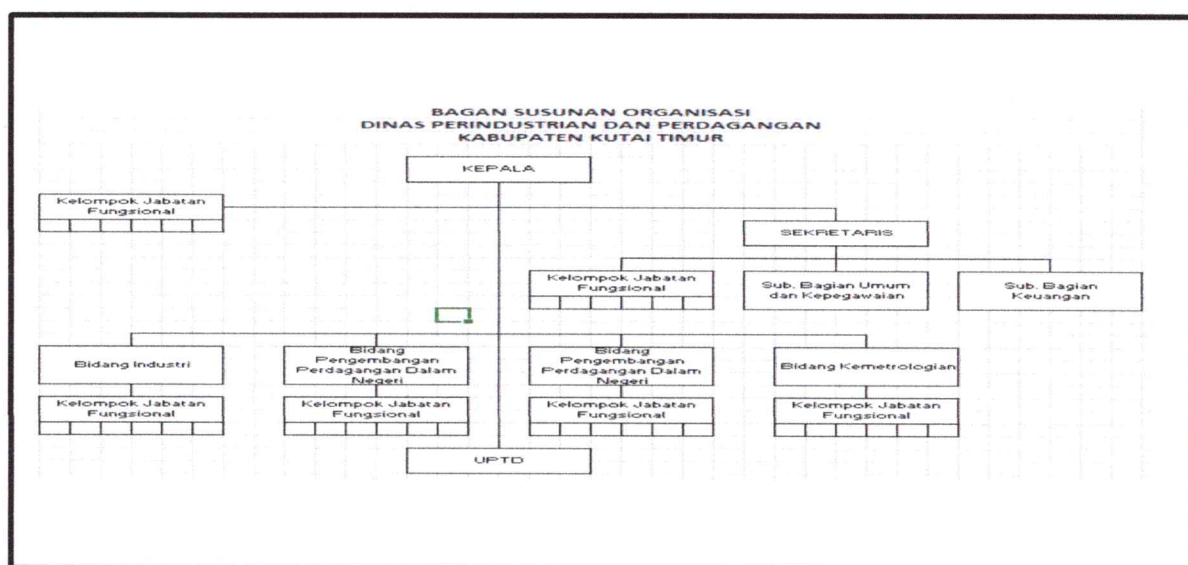
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri dan perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan perindustrian dan perdagangan; dan/atau.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala UPT. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi





A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan penting pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Kurangnya SDM aparatur secara kuantitas maupun kualitas

2. Bidang Perindustrian

- a. Belum optimalnya proses hilirisasi komoditi unggulan, sehingga perlu peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah
- b. Banyak produk IKM yang belum tersertifikasi dan pemasaran produknya belum memanfaatkan e-commerce
- c. Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD
- d. Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standart kelayakan produksi (SNI, ISO dan lainnya)
- e. Masih rendahnya klaster industri yang berkembang



- f. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar
 - g. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
 - h. Tebatasnya dukungan insfrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan mesin
 - i. Belum meratanya kapasitas dan kerampilan SDM industri kecil terkait dengan penguasaan teknologi industri
 - j. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal
 - k. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha
 - l. Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang industri belum memadai, khususnya yag memiliki latar belakang teknis (Technical Background) di bidang Teknik dan manajemen industri. Demikian tenaga penyuluh industry di tingkat kecamatan belum pernah tersedia. Tenaga penyuluh industri ini sangat penting peranannya terutama di dalam proses pemantauan dan penyediaan data / informasi terhadap perkembangan di bidang industri. Kelengkapan dan akurasi data / informasi tersebut merupakan faktor esesnsial dalam perencanaan di masa-masa yang akan datang.
3. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- a. Penyediaan sarana prasarana pasar di wilayah kecamatan dan desa yang kurang memadai



- b. Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan BBM belum dilakukan secara kontinyu
 - c. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya Kawasan pedagang kaki lima
 - d. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan / pasar modern, dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan. Hal ini dipastikan akan bertambah seiring dengan perekonomian yang semakin maju
 - e. Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang perdagangan belum memadai, khususnya yang memiliki latar belakang teknis (Technical background) di bidang Teknik dan manajemen perdagangan di tingkat kecamatan yang belum pernah tersedia. Tenaga penyuluh perdagangan ini sangat penting peranannya terutama dalam proses pemantauan dan penyediaan data / informasi terhadap perkembangan di bidang perdagangan. Kelengkapan dan akurasi data / informasi tersebut merupakan faktor esensial dalam perencanaan dimasa-masa yang akan datang.
4. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- a. Dominasi migas dan batubara membuat transformasi ekonomi berjalan lambat sebagai akibat tekanan ekonomi global, mempengaruhi kontribusi sector perdagangan terhadap PRDB secara tidak langsung sehingga perlu pengembangan terhadap ekspor produk unggulan daerah



- b. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan karena banyak IKM yang belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mempromosikan produknya dengan efektif dan efisien.
 - c. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan
 - e. Stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang melalui pengendalian perdagangan
5. Bidang Kemetrolgian
- a. Kurangnya alat standar untuk verifikasi dan tera
 - b. Belum ada ruangan atau bangunan Gedung untuk fasilitas laboratorium dan kurangnya peralatan pendukungnya

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Lebih merangkul dan menguatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang bersangkutan (Pemda Kab. Kutai Timur)
2. Dari segi pendanaan, anggaran TA. 2025 terjadi pemangkasan anggaran sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda, akan tetapi untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang urgent sudah tercukupi dengan baik.



B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;



E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan



Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Misi ke-2 dan 3 , yaitu :

1. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
2. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	13 Pasar	14 Pasar	15 Pasar	16 Pasar	17 Pasar
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1425 IKM	1518 IKM	1620 IKM	1733 IKM	1860 IKM
3.	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	Pasar		-	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	IKM		$\frac{N-(N-1)}{N-1} \times 100\%$	Bidang Industri
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%		-	Sekretariat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025



B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan	Jumlah pasar	Pasar	16
2	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Jumlah IKM	IKM	1733
3	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur



Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Sasaran dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	Pasar	16
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	IKM	1733
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Peningkatan Aktifitas Perdagangan Dalam Negeri	1 Laporan	Rp 993,356,475
	- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan SKA	1 Dokumen	Rp 993,356,475
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp 989,363,720
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp 989,363,720
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Operasi Pasar	4 Kali	Rp 9,737,389,937
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Penting Kab / Kota	1 laporan	Rp 345,457,380
	- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang di Tingkat Pasar	1 Laporan	Rp 9,391,932,557
4	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor	6 Pelaku Usaha	Rp 2,478,292,220
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Rp 2,478,292,220
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah alat UTTP yang Tersetandarisasi	400 Layanan	Rp 2,499,999,632
	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1 Laporan	Rp 2,499,999,632
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri	100%	Rp 582,952,348
	- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Rp 582,952,348
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim	19 Layanan	Rp 46,753,450,472
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 969,065,993
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 24,622,280,865
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 49,590,000
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 3,763,178,157
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 3,098,110,000
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 5,125,572,701
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 1,965,941,949
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 7,159,710,807
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733 IKM	Rp 3,848,716,135
	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Rp 3,848,716,135
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha	10 IKM	Rp 199,487,000
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Rp 199,487,000
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1 Dokumen	Rp 495,313,000
	- Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha industri	1 Dokumen	Rp 495,313,000
UPT Pasar Induk Sangatta Utara				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp 8,351,900
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp 8,351,900
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim		Rp 2,487,550,446
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 32,834,910
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 321,553,537
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 148,009,000
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 1,801,200,000
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 183,952,999



UPT Pasar Induk Sangkulirang				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp -
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp -
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim		Rp 992,178,990
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 30,000,000
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 423,698,990
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 538,480,000
UPT Pasar Induk Muara Wahau				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp -
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp -
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim		Rp 1,492,977,600
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 40,653,000
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 477,024,600
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 970,920,000
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 4,380,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 27 bulan Oktober tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	Pasar	16
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	IKM	1733
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Peningkatan Aktifitas Perdagangan Dalam Negeri	1 Laporan	Rp 71,943,000
	- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan SKA	1 Dokumen	Rp 71,943,000
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp 49,517,549,000
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentasse Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp 49,517,549,000



3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Operasi Pasar	4 Kali	Rp	9,045,629,414
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Penting Kab / Kota	1 laporan	Rp	212,875,700
	- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang di Tingkat Pasar	1 Laporan	Rp	8,832,753,714
4	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor	6 Pelaku Usaha	Rp	354,538,031
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten /	1 Dokumen	Rp	354,538,031
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah alat UTP yang Tersetandarasi	400 Layanan	Rp	468,886,500
	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1 Laporan	Rp	468,886,500
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri	100%	Rp	14,213,332
	- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Rp	14,213,332
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim	19 Layanan	Rp	27,458,726,996
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	196,455,000
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	22,982,341,016
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	-
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	251,200,000
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	726,480,882
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp	-
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp	2,249,593,854
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp	1,052,656,244
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733 IKM	Rp	2,878,619,126
	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Rp	2,878,619,126
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha	10 IKM	Rp	50,000,000
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Rp	50,000,000
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1518 IKM	Rp	-
	- Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha industri	100%	Rp	-
UPT Pasar Induk Sangatta Utara					
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp	1,687,500
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp	1,687,500
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim		Rp	1,869,599,220
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	-
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp	106,417,220
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp	6,482,000
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp	1,756,700,000



	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	-
UPT Pasar Induk Sangkulirang				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp -
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp -
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim		Rp 592,199,630
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp -
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 106,219,630
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 485,980,000
UPT Pasar Induk Muara Wahau				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 unit	Rp -
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Prosentase Pasar yang Terfasilitasi	38%	Rp -
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Publik Terhadap aparatur Disperindag Kab. Kutim		Rp 1,003,287,600
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp -
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 71,367,600
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 931,920,000
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp -

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh



berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada



Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	16	15	94%	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733	1737	100%	Sangat Tinggi	Bidang Industri
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat



Uraian penjelasan tabel :

- Prosentase jumlah pasar di wilayah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 adalah sebesar 94% dengan realisasi sebanyak 15 pasar, dari segi realisasi yang ada belum mencapai jumlah target yang ditetapkan akan tetapi dari skala interpretasi masih dapat dikategorikan sangat tinggi dalam pengukuran hasil kinerja atas indikator kinerja utama dinas.
- Prosentase pertumbuhan jumlah IKM pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari realisasi sebanyak 1737 IKM dimana nilai pertumbuhan tersebut melampaui target yang ditetapkan sebanyak 1733 IKM dan dalam skala interpretasi termasuk kategori berhasil oleh karena itu diharapkan kepada pihak Pemerintah supaya terus dapat memfasilitasi dan memberikan pembinaan secara komprehensif sehingga usaha industri kecil dan menengah dapat terus mengalami pertumbuhan dan bertahan.
- Target Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan pada tahun 2025 sebesar 100% dan pencapaian realisasinya juga sebesar 100% sehingga dalam skala interpretasinya termasuk dalam kategori berhasil.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	15	15	100%	16	15	94%
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1620	1633	101%	1733	1737	100%
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Uraian penjelasan tabel :

- Meningkatnya Sarana dan Insfrastruktur Pendukung Ekonomi dengan indikator Jumlah Pasar Capaian Kinerja pada tahun 2024 tersealisasi sebesar 100% sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 94%. Menurunnya capaian kinerja tersebut terjadi karena supporting anggaran tidak terakomodir secara maksimal terhadap rencana kerja anggaran.
- Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah dengan indicator Pertumbuhan Jumlah IKM Pencapaian Kinerja pada tahun 2024 sebesar 101% sedangkan Pencapaian Kinerja tahun 2025 sebesar 100%.
- Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan Indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 sama-sama sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Sarana dan Insfrastruktur pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	15	16	94%
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1737	1733	100%
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	100%	100%



Uraian penjelasan tabel :

- Tingkat kemajuan meningkatnya Sarana dan Insfrastruktur Pendukung Ekonomi adalah 94% dengan realisasi kinerja di tahun 2025 sebesar 15 dan target akhir 2025 sebesar 16.
- Tingkat Kemajuan Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah adalah 100% dengan realisasi kinerja di tahun 2025 sebesar 1737 dan target akhir 2025 sebesar 1733.
- Tingkat Kemajuan Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan adalah 100% dengan realisasi kinerja di tahun 2025 sebesar 100% dan target akhir 2025 sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Kutai Timur lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Sasaran dan Insfrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	15		
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1737		
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

.....



Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya Sasaran dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah pasar	16	15	94%	Ta. 2025 penganggaran hanya melanjutkan kegiatan pembangunan pasar di 2 Kecamatan yaitu di Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan bengalon	maka solusi yang dilakukan oleh DISPERINDAG Kab. Kutai Timur menganggarkan perencanaan pembangunan pasar di lokasi Kecamatan yang belum terbangun
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733	1737	100%	Meningkatnya sektor Perdagangan yang menjanjikan sehingga memicu pertumbuhan jumlah IKM yang cukup pesat	Perlu adanya pendampingan dan penyediaan sarana dan prasarana guna penunjang pertumbuhan IKM
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	-	-

Uraian penjelasan tabel :

- Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dengan capaian 94%, dapat dianalisa keberhasilannya dikarenakan belum adanya realisasi Pembangunan pasar dikarenakan terkendalanya anggaran. Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menganggarkan perencanaan Pembangunan pasar dilokasi kecamatan yang belum terbangun .
- Meningkatnya kemampuan perekonomian di Daerah dengan capaian 100%, dapat dianalisa keberhasilannya karena meningkatnya sektor perdagangan yang menjanjikan sehingga memicu pertumbuhan IKM yang cukup pesat. Solusi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya pendampingan dan penyediaan sarana dan prasarana guna penunjang pertumbuhan IKM.
- Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan laporan Keuangan dengan capaian 100%.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	94%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar		
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana - Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan	85%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana - Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Sangatta Utara	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan	95%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana - Distribusi Perdagangan UPT Pasar Sangkulirang	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana - Distribusi Perdagangan UPT Pasar Muara Wahau	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		
				Program Pertizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan		
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	100%	Menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Operasi Pasar		
				Menjamin Ketersediaan Barang - Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Penting Kab / Kota	93%	Menunjang
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang - Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor		
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah	100%	Menunjang
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	Menunjang
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri		
				- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	Menunjang
2	Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	100%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM		
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana - Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan Industri	92%	Menunjang
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang mendapatkan terbit usaha		Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), - IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Jumlah Izin yang di awasi	100%	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota		
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, - IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota		



3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		
				- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74%	Menunjang
				- Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86%	Menunjang
				- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
				- Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				- Administrasi kepegawaian perangkat daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				- Administrasi kepegawaian perangkat daerah UPT. Pasar Sangkulirang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				- Administrasi kepegawaian perangkat daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				- Administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	99%	Menunjang
				- Administrasi umum perangkat daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	97%	Menunjang
				- Administrasi umum perangkat daerah UPT. Pasar Sangkulirang	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				- Administrasi umum perangkat daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96%	Menunjang
				- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	Menunjang
				- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99%	Menunjang
				- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT. Pasar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99%	Menunjang
				- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99%	Menunjang
				- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah UPT. Pasar Induk Sangatta Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Uraian penjelasan tabel :

- Dari tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan di atas Sub Kegiatan yang menunjang adalah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (85%), Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Sangatta Utara (95%), Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) (100%), Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten / Kota (93%), Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota (100%), Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui



Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota (100%), Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (100%), Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (100%), Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (92%), Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan (100%), Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (74%), Administrasi Keuangan perangkat daerah (86%), Administrasi kepegawaian perangkat daerah (100%), Administrasi umum perangkat daerah (99%), Administrasi umum perangkat daerah UPT. Pasar Sangatta Utara (97%), Administrasi umum perangkat daerah UPT. Pasar Sangkulirang (100%), Administrasi umum perangkat daerah UPT. Pasar Muara Wahau (100%), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara (96%), Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (98%), Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT. Pasar Sangatta Utara (99%), Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT. Pasar Sangkulirang (100%), Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT. Pasar Muara Wahau (99%) dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah (99%).

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 71,943,000.00	71,894,494.00	100%
	- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Rp 71,943,000.00	71,894,494.00	100%
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 49,519,236,500.00	42,217,143,298.00	85%
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 49,517,549,000.00	42,215,543,298.00	85%
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Sangatta Utara	Rp 1,687,500.00	1,600,000.00	95%
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Sangkulirang	Rp -	-	
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Muara Wahau	Rp -	-	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 9,045,629,414.00	Rp 8,999,581,917.00	99%
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten / Kota	Rp 212,875,700.00	198,375,463.00	93%
	- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Rp 8,832,753,714.00	8,801,206,454.00	100%
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp 354,538,031.00	354,468,031.00	100%
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota	Rp 354,538,031.00	354,468,031.00	100%
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 468,886,500.00	468,574,552.00	100%
	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 468,886,500.00	468,574,552.00	100%
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 14,213,332.00	14,213,332.00	100%
	- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 14,213,332.00	14,213,332.00	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 30,923,813,446.00	27,574,902,947.00	89%
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 196,455,000.00	146,281,670.00	74%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22,982,341,016.00	19,766,904,531.00	86%
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp -	-	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 251,200,000.00	250,793,400.00	100%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Rp -	-	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangkulirang	Rp -	-	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Rp -	-	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 726,480,882.00	722,601,741.00	99%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangatta	Rp 106,417,220.00	102,807,560.00	97%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangkulirang	Rp 106,219,630.00	106,219,530.00	100%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Muara	Rp 71,367,600.00	71,367,600.00	100%



	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp	-		
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Rp	6,482,000.00	6,250,000.00	96%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2,249,593,854.00	2,214,820,762.00	98%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Rp	1,756,700,000.00	1,738,070,000.00	99%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangkulirang	Rp	485,980,000.00	484,179,850.00	100%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Rp	931,920,000.00	920,301,725.00	99%
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1,052,656,244.00	1,044,304,578.00	99%
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	Rp	-	-	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Muara Wahau	Rp	-	-	
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	2,878,619,126.00	2,659,840,023.00	92%
	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Rp	2,878,619,126.00	2,659,840,023.00	92%
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Rp	50,000,000.00	49,973,114.00	100%
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	50,000,000.00	49,973,114.00	100%
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	-	-	
	- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	-	-	

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	Meningkatnya Sasaran dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	16	15	94%	59,474,446,777.00	52,125,875,624.00	88%	1.069666326
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	1733	1737	100%	2,928,619,126.00	2,709,813,137.00	93%	1.083240293
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	100	100%	30,923,813,446.00	27,574,902,947.00	89%	1.121447771



Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

- Meningkatnya Sasaran dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dengan tingkat efisiensi 1,07.
- Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah dengan tingkat efisiensi 1,08.
- Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan Tingkat efisiensi 1,12.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1	0	0%	Rp 71,943,000.00	71,894,494.00	100%	
	- Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	1	1	100%	Rp 71,943,000.00	71,894,494.00	100%	1.000674683
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16	15	94%	Rp 49,519,236,500.00	42,217,143,298.00	85%	
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38	27	71%	Rp 49,517,549,000.00	42,215,543,298.00	85%	0.833425769
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Sangatta Utara	38	27	71%	Rp 1,687,500.00	1,600,000.00	95%	0.749383224
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Sangkulirang							
	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT. Pasar Muara Wahau							
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4	12	300%	Rp 8,832,753,714.00	8,801,206,454.00	100%	
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	1	100%	Rp 212,875,700.00	198,375,463.00	93%	1.073094912
	- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	1	1	100%	Rp 8,832,753,714.00	8,801,206,454.00	100%	1.003584424
4	Program Pengembangan Ekspor	6	6	100%	Rp 354,538,031.00	354,468,031.00	100%	
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota	1	1	100%	Rp 354,538,031.00	354,468,031.00	100%	1.000197479



5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	400	435	109%	Rp 468,886,500.00	468,574,552.00	100%	
	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1	1	100%	Rp 468,886,500.00	468,574,552.00	100%	1.000665738
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100		0%	Rp 14,213,332.00	14,213,332.00	100%	
	- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	1	100%	Rp 14,213,332.00	14,213,332.00	100%	1
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	19	19	100%	Rp 30,923,813,446.00	27,574,902,947.00	89%	
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%	Rp 196,455,000.00	146,281,670.00	74%	1.342991231
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	100%	Rp 22,982,341,016.00	19,766,904,531.00	86%	1.162667679
	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	100%	Rp 251,200,000.00	250,793,400.00	100%	1.001621255
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara							
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangkulirang							
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT. Pasar Muara wahau							
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	100%	Rp 726,480,882.00	722,601,741.00	99%	1.005368297
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	1	1	100%	Rp 106,417,220.00	102,807,560.00	97%	1.035110842
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangkulirang	1	1	100%	Rp 106,219,630.00	106,219,530.00	100%	1.000000941
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Muara wahau	1	1	100%	Rp 71,367,600.00	71,367,600.00	100%	1
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	1	1	100%	Rp 6,482,000.00	6,250,000.00	96%	1.03712
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	100%	Rp 2,249,593,854.00	2,214,820,762.00	98%	1.015700183
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara	1	1	100%	Rp 1,756,700,000.00	1,738,070,000.00	99%	1.010718786
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangkulirang	1	1	100%	Rp 485,980,000.00	484,179,850.00	100%	1.003717937
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Muara wahau	1	1	100%	Rp 931,920,000.00	920,301,725.00	99%	1.012624419
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	100%	Rp 1,052,656,244.00	1,044,304,578.00	99%	1.007997347
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara							
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT. Pasar Muara wahau							
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1733	1737	100%	Rp 2,878,619,126.00	2,659,840,023.00	92%	
	- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	1	1	100%	Rp 2,878,619,126.00	2,659,840,023.00	92%	1.08225273
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	10	10	100%	Rp 50,000,000.00	49,973,114.00	100%	
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	1	1	100%	Rp 50,000,000.00	49,973,114.00	100%	1.000538009
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional							
	- Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							

Uraian penjelasan tabel :

Dari perbandingan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2025 tingkat efisiensinya dapat dijelaskan sebagai berikut: Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) (1,00), Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (0,833), Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



UPT. Pasar Sangatta Utara (0,75), Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (1,07), Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota (1,00), Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Satu Daerah Kabupaten / Kota (1,00), Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (1,00), Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (1,00), Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1,34), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1,16), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1,00), Administrasi Umum Perangkat Daerah (1,00), Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara (1,04), Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Sangkulirang (1,00), Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT. Pasar Muara wahau (1,00), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara (1,04), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1,02), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangatta Utara (1,01), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Sangkulirang (1,00), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT. Pasar Muara wahau (1,01), Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1,00), Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota (1,08) dan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota (1,00).

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 (Satu) Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Pasar dengan capaian kinerja sebesar 94% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 2 (Dua) Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Daerah terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Jumlah IKM dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)



- Sasaran 3 (tiga) Terpenuhinya Tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

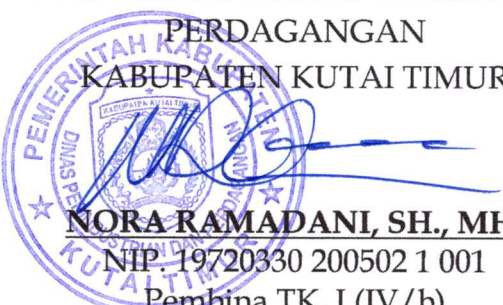
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 93.326.879.349,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 82.410.591.708,00** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar **88.30%** dan nilai efisiensi anggaran sebesar **1,09%**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur, 19 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



NORA RAMADANI, SH., MH.
NIP. 19720330 200502 1 001
Pembina TK. I (IV/b)

LAMPIRAN

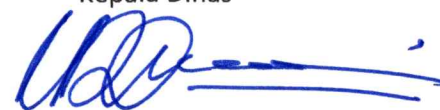


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATPR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Sarana dan Insfrastruktur Pendukung Ekonomi	1	Jumlah Pasar	16
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733

Sangatta, Januari 2025

Kepala Dinas



Nora Ramadani, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19720330 200502 1 001

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERAKHIR REGISTRASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PEMANGKUT GAWAN	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	JUMLAH PASAR		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.100.000.000	100 %	3.200.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.400.000.000			
		3.30.003.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di Kutai Timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Kutai Timur	3.30.002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	275.000.000	1 Rekomendasi	300.000.000	1 Rekomendasi	350.000.000			
		3.30.002.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AWAL PERIODE KENYATAAN	UNIT KINERJA PERANGKAT BAKUPER PERANGKUT DAERAH	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.002.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			
		3.30.002.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langgung Minum di Tempat	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																							
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																	
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENYTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGULN G JAWAB	LO KA SI			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
URUSAN PILIHAN																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																							
Meningk atkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Meningkat nya dan meratanya pembangun an sarana dan prasarana perdagangan di kutai timur	3.30.002.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian Barang Beredar Berbahaya Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	40.000.000	100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-						
		3.30.002.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000						

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE KINERJA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGKUAN GJAWAB	LO KASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di Kutai timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Kutai timur	3.30.004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTINGa	Jumlah Operasi Pasar		4 Kali	-	4 Kali	600.000.000	4 Kali	650.000.000	4 Kali	700.000.000	4 Kali	750.000.000	4 Kali	800.000.000			
		3.30.004.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota)	Terlaksananya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			
		3.30.004.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000			

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIOD PERENCANAAN	UNIT KERA PERENCANAAN DAERAH	LO KASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di Kutai Timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Kutai Timur	3.30.005	PROGRAM PENGEMBANGAN ANEKSOR	Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor		0 Dokumen	-	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000	5 IKM	200.000.000			
		3.30.005.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah		100 %	-	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	400.000.000	100 %	500.000.000	100 %	700.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENCANA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di Kutai Timur	Meningkatkan dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Kutai Timur	3.30.004.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE KENDRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KINERJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di Kutai Timur	Meningkatnya dan meratanya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Kutai Timur	3.30.007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	TERSELENGGARANYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE KENSTRAN PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Terpenuhi Tata Kelola Administ rasi Perkantora n dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n dan Laporan Keuangan	3.31.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		100 %	12.441.465.105	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205	100 %	12.347.461.205			
		3.31.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000			

URUSAN PERENCANAAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Tempat Irya Tala Kedala Administ rasi Perakur an dan Lapora Kuang n	Cakupa Pelayan Administ si Perakur an dan Lapora Kuang n	3.3.1001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERUNTAYA N DAERAH KABUPATEN OTA	Cakupa Pelayan Administ si Perakur an dan Lapora Kuang n		100 %	12441,465.10 5	100 %	12347,461.20 5	100 %	12347,461.205	100 %	12347,461.20 5	100 %
3.3.1001.2.01	Perencanaan, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %
3.3.1001.2.02	Administrasi Kuang Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kuang Perangkat Daerah				100 %	11.500.000.000 0	100 %	11.500.000.000 0	100 %	11.500.000.000	100 %	11.500.000.000 0	100 %
3.3.1001.2.03	Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %
3.3.1001.2.04	Administrasi Pendapaa Daerah Kewangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapaa Daerah Kewangan Perangkat Daerah				0 Dokumen	- 0	0 Dokumen	- 0	0 Dokumen	- 0	0 Dokumen	- 0	0 Dokume n
3.3.1001.2.05	Administrasi Keperawatan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keperawatan Perangkat Daerah				100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %
3.3.1001.2.06	Administrasi Utama Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi utama Perangkat Daerah				100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %
3.3.1001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Uraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Uraan Pemerintah Daerah				100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %

URUSAN PILIHAN														
URUSAN PERENCANAAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Terpilihnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	3.31.001.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Pemertintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan Jasa Pemenuhan Pemertintahan Daerah	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000		
		3.31.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Pemertintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Pemertintahan Daerah	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTALIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONEKSI KINERJA AKHIR PERIODE BENTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGKULAN OJAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Menciptakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	3.31.004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis Sistem Informal Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	150.000.000	1425	280,630,000	1518	150.000.000	1620	200.000.000	1733	250.000.000	1860	300.000.000			
		3.31.003.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), IzinUsaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang diawasi		100 %	150.000.000	100 %	280,630,000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000			

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGRT KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONEKSI KEBERHA KAKER PERKODE KEMETRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN GIAWAR	LO KA SI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
Mencipta kan Pembang unan Industri Kecil dan Menenga h yang berkualit as	Persentase Pertumbuh an Jumlah IKM	3.31.001	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah IKM		1341	150.000.000	1425	280.630.000	1518	150.000.000	1620	200.000.000	1733	250.000.000	1860	300.000.000			
		3.31.002.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri		100 %	150.000.000	100 %	280.630.000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	300.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODIK KENYATAAN PERAKHIBATAN DAERAH	UNIT KERJA PERAKHIBATAN DAERAH	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
3.31.3.30.0.00.01.0001 UPT Pasar Induk Sangatta Utara																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di Kutai Timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.003.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.700.000.000			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUMBER PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 - 2026																				
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONTENSI KEMERJAAN AKHIR PERIODE SENTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGKULIRANG GAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
URUSAN PILIHAN																				
3.31.3.30.0 00.01.0002 UPT Pasar Sangkulirang																				
Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perdagangan di kutai timur	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas	3.30.003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar		13 PASAR	3.000.000.000	13 Pasar	3.000.000.000	14 Pasar	3.100.000.000	15 Pasar	3.200.000.000	16 Pasar	3.300.000.000	17 Pasar	3.400.000.000			
		3.30.003.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang diberikan fasilitas pengelolaan		100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000			



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nora Ramadani**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19720330 200502 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Ardiansyah Sulaiman**
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung dari **pihak pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur

Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Nora Ramadani
Pembina (IV/a)
NIP. 19720330 200502 1 001

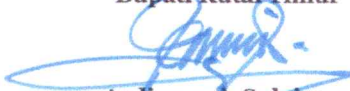
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Sasaran dan Insfrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah Pasar	16 Pasar
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733 IKM
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%

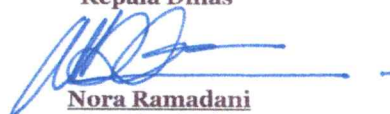
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 993.356.475	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 997.715.620	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 9.737.389.937	
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp 2.478.292.220	
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 2.499.999.632	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 582.952.348	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 51.726.157.508	
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 3.848.716.135	
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 199.487.000	
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Rp 495.313.000	
	JUMLAH	Rp 73.559.379.875	

Sangatta, Januari 2025

Bupati Kutai Timur


Ardiansyah Sulaiman

Kepala Dinas


Nora Ramadani
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19720330 200502 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nora Ramadani**
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19720330 200502 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Ardiansyah Sulaiman**
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung dari **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Bupati Kutai Timur**

ARDIANSYAH SULAIMAN

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan**

NORA RAMADANI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720330 200502 1 001

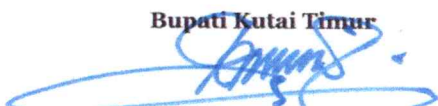
**PERUBAHAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Sasaran dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Jumlah Pasar	16 Pasar
2	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian Di Daerah	Pertumbuhan Jumlah IKM	1733 IKM
3	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%

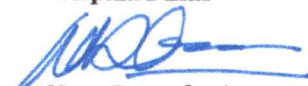
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 71.943.000	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 49.519.236.500	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 9.045.629.414	
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp 354.538.031	
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 468.886.500	
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 14.213.332	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 30.923.813.446	
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 2.878.619.126	
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp -	
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Rp 50.000.000	
	JUMLAH	Rp 93.326.879.349	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Bupati Kutai Timur


Ardiansyah Sulaiman

Kepala Dinas


Nora Ramadani
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19720330 200502 1 001

